

**THE INFLUENCE OF VILLAGE FUNDING BUDGET AND VILLAGE
MIDDLE-TERM DEVELOPMENT PLAN ON THE DEVELOPMENT OF
SEI FREE VILLAGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE
DISTRICT OF BATU JAYA DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY**

By : Sri Muamah
NIM. 15.10.089.530.374

Management Study Program
Indragiri College of Economics
srimuamah20@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of the village fund budget and medium term development plan to the infrastructure development sei bebas hilir village lubuk batu jaya subdistrict indragiri hulu district. The relevant data are taken with quantity and quality analyses.

Data analyses method used are interview, validity and realibility test of multiple regression analysis, correlation coefficient, f test and t test.

The conclusion from the results above is the village fund budget and medium term development plan to the infrastructure development sei bebas hilir village lubuk batu jaya subdistrict indragiri hulu district. F test show that variable of the village fund budget and medium term development plan have significant influence to the infrastructure development sei bebas hilir village lubuk batu jaya subdistrict indragiri hulu district at the 5% significant level. Correlation coefficient show that variable village fund budget and medium term development have veri high influence to the infrastructure development sei bebas hilir village lubuk batu jaya subdistrict indragiri hulu district. Village fund budget and medium term development plan could explain the changes in the infrastructure development sei bebas hilir village lubuk batu jaya subdistrict indragiri hulu district for 98.6 percent and the balance of 1.4 percent is explained by the other variables which did not included in the this research.

***Keywords : Village Fund Budget, Medium Term Development plan and Infrastructure
Development Village***

**PENGARUH ANGGARAN DANA DESA DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SEI BEBERAS HILIR
KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh : Sri Muamah
NIM. 15.10.089.530.374

Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri
srimuamah20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh anggaran dana desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian dilakukan dengan interview dan questioner dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa apabila variabel Anggaran Dana Desa (X_1) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (X_2) nilainya adalah konstan, maka Pembangunan Infrastruktur (Y) meningkat. Jika Anggaran Dana Desa naik sebesar satu satuan, sedangkan variabel X_2 tetap maka Pembangunan Infrastruktur meningkat. Jika variabel independen lain nilainya tetap dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mengalami kenaikan satu satuan, maka Pembangunan Infrastruktur (Y) meningkat. Hasil Uji F menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat diartikan bahwa secara simultan anggaran dana desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil Uji t antara variabel Anggaran Dana Desa (X_1) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial Anggaran Dana Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). Hasil Uji t antara variabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (X_2) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). Diperoleh pengaruh anggaran dana desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa terhadap pembangunan infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah. Sedangkan berdasarkan tabel analisis R^2 (R Square) atau disebut koefisien determinasi menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) terhadap variabel dependen (Pembangunan Infrastruktur) Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) mampu menjelaskan dari variasi variabel dependen (Pembangunan Infrastruktur). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Pembangunan Infrastruktur Desa**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sudah berlangsung sangat lama dan tidak sedikit juga dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan yang dialami oleh Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam sisi, diantaranya ialah lemahnya perencanaan, rendahnya kualitas, dan masih banyak lagi. Pemerintah tentunya harus memperhatikan hal ini dengan cermat, mengingat tidak lama lagi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akan bergulir. Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, maka sangat diperlukan infrastruktur yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dalam paper ini, penulis akan memasukan beberapa variabel pendukung yang dianggap mampu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Indonesia seperti kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, dan pembabasan hak tanah.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kekayaan desa merupakan salah satu asset dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki seperangkat pendapatan dan kekayaan ini Pemerintah Desa akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENGARUH ANGGARAN DANA DESA DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN**

**INFRASTRUKTUR DESA SEI BEBERAS HILIR KECAMATAN
LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU “.**

B. Perumusan Masalah

- a. Apakah Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?
- b. Apakah Anggaran Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?
- c. Apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa secara simultan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Dana Desa secara parsial terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Untuk mengetahui pengaruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa secara parsial terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu..

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan, dll. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan. Dalam implementasi pembangunan infrastruktur setidaknya ada sekitar 3 faktor yang penulis yakini sebagai penyebab kurang efektifnya pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah Kebijakan Pemerintah, Sarana dan Prasarana, Anggaran Dana Desa, Rencana Pembangunan dan Pembebasan Hak Tanah. (Suryaningrat, 2009:101-102)

Pembangunan pedesaan di Indonesia menginginkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Selain itu sasaran pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, akan tetapi juga pembangunan mental spiritual. Asumsi yang melandasi ini ialah bahwa pembangunan berpangkal dan juga bertujuan pada diri manusia. Karena itu penelusuran terhadap makna pembangunan senantiasa tidak dapat melepaskan diri dari manusia yang mempunyai potensi dan yang sering dipandang sebagai subjek maupun objek pembangunan. Titik tolak dari falsafah pembangunan adalah manusia dan tujuannya akhirnya adalah manusia pula

Apabila tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, kenyatannya memang menunjukkan bahwa keadaan seperti ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terjadi akibat pola pendekatan pembangunan yang ditetapkan selama ini masih cenderung bersifat top down. Pendekatan ini kurang berorientasi terhadap upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Asumsi dari pendekatan ini (*top down*) adalah masyarakat, khususnya yang berada di desa kurang mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Pendekatan ini juga dianggap kurang memandang masyarakat desa sebagai modal, daya dan potensi pembangunan.

Pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan pedesaan menghasilkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan bagi

seluruh rakyat. Hal ini karena 80% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan

Pembangunan desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Dengan mendasarkan kepada pendekatan bahwa pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka terdapat adanya kewajiban yang harus dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat secara seimbang.

Mencermati pengertian pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa sebagai dua istilah yang berbeda dapat dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut juga dikenal di dunia internasional, yaitu pembangunan masyarakat desa sebagai “*Community Development*” yang mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*Community Approach*) partisipasi masyarakat (*community participation*) dan organisasi kemasyarakatan (*community organisation*). Dalam hubungan ini pendekatan-pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya kepada inisiatif dan kreasi masyarakat.

Sedangkan pembangunan desa sebagai “*Rural Development*” mempunyai arti yang lebih luas lagi. Pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan, dimana pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian apabila kita berbicara tentang pembangunan pedesaan maka pada hakikatnya yang kita pikirkan adalah pembangunan masyarakat desa

Pembangunan desa sepenuhnya dapat pula dilihat dari berbagai segi. Ia merupakan suatu proses perubahan dari tata cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang lebih maju. Ia juga merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemampuan

membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka punyai. Banyak pakar pembangunan desa, khususnya negara berkembang berpendapat bahwa strategi pembangunan berencana dipandang mampu mempercepat proses perubahan itu. Dalam pembangunan seperti ini masyarakat perlu berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan disamping keikutsertaan pihak-pihak luar. Masyarakat ikut serta dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka serta ikut dalam pelaksanaannya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada mereka

Pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dalam penjelasan UU NO. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dimana dicantumkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah

Sebagai “proses” maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologis. Sebagai “metode” ia lebih ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai. Sebagai “program” maka tekanannya pada bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan sebagai “gerakan” maka pembangunan desa ditekankan kepada kerangka ideologi yang mendasari dan mengarahkan proses, metode dan program pembangunan desa itu sendiri. Lebih penting dari semua itu adalah ketika pembangunan desa telah menjadi ”gaya hidup”. Artinya orientasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik telah tertanam sebagai komitmen umum masyarakat yang melembaga, sehingga dalam perjalanan waktu selalu diupayakan agar dengan sumberdaya, aset dan kemampuan yang dimiliki dapat dicapai kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena realisasinya berusaha menyentuh segala lapisan masyarakat, melalui pembangunan yang menyeluruh, menyebar luas ke seluruh pedesaan dan dengan menggali serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Memadukan arah pembangunan sektoral maupun regional sesuai

dengan kebutuhan esensial masyarakatnya. Kebijakan pelaksanaan dalam pembangunan desa adalah gambaran dari suatu proses pembangunan ke arah terciptanya Desa Swasembada sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Pembangunan Desa menurut penelitian yang dilakukan (RIDWAN, 2018) bahwa pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya. Agar gerak dan arah pembangunan desa senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di desa maka perlu adanya prinsip pokok kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip pokok tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan.

Pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan sesuatu hal yang penting yang perlu dilakukan dan didukung oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Karena begitu pentingnya pelaksanaan pembangunan pedesaan maka kiranya perlu suatu perencanaan yang terpadu dengan asumsi bahwa pembangunan dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para

inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPB, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. (Soewito, 2010:41)

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.(Chambert, 2009:88)

Dana secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat desa itu juga.

Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. (Sawe, 2016:78)

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan

masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan.

3. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan.

B. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berasal dari responden sebagai objek penelitian, yang berupa pendapat responden..

b. Data Sekunder

Yaitu Data yang diperoleh melalui pihak lain diluar responden yang sudah ada di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

C. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasi, maka penulis menggunakan metode korelasi regresi linier berganda, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa data selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Analisis regresi berganda

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 0.109 + 0.020X_1 + 1.001X_2$$

2. Koefisien korelasi

Dari perhitungan diatas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.993 berarti mendekati 1, maka disini dapat dikatakan bahwa pengaruh Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah. Sedangkan berdasarkan tabel analisis di atas diperoleh angka R^2 (*R Square*) atau disebut koefisien determinasi adalah sebesar 0.986. artinya 98.6%. menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) terhadap variabel dependen (Pembangunan Infrastruktur) Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) mampu menjelaskan sebesar 98.6% dari variasi variabel dependen (Pembangunan Infrastruktur). Sedangkan sisanya sebesar 1.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

3. UJI-F

UJI-F dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi 5%, nilai F hitung 2913.652 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2913.652 > 3.11$) atau $Sig F < 5 \%$ ($0.001 < 0,05$) Karena nilai signifikansi uji F lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat diartikan bahwa secara simultan Anggaran Dana Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

4. Uji-t

Uji-t dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi 5%, nilai t hitung 8.030. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.030 > 1,989$) maka secara parsial anggaran dana desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur (Y)

Uji-t dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi 5%, nilai t hitung 54.222. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($54.222 > 1,989$) maka secara parsial rencana pembangunan jangka menengah desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur (Y).

Hasil analisa data menunjukkan bahwa :

1. Variabel Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah
2. Koefisien korelasi 0.993 dan bertanda positif

Artinya :

1. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel Anggaran Dana Desa (X_1) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (X_2) nilainya adalah 0, maka Pembangunan Infrastruktur (Y) nilainya adalah sebesar 0.109.
2. Koefisien regresi variabel Anggaran Dana Desa (X_1) sebesar 0.020. Artinya jika Anggaran Dana Desa naik sebesar satu satuan, sedangkan variabel X_2 tetap maka Pembangunan Infrastruktur meningkat sebesar 0.020.
3. Koefisien regresi variabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (X_2) sebesar 1.001 artinya jika independen lain nilainya tetap dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mengalami peningkatan satu satuan, maka Pembangunan Infrastruktur (Y) sebesar 1.001.
4. Diperoleh koefisien korelasi sebesar .993 berarti mendekati 1, maka disini dapat dikatakan bahwa pengaruh Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah.

Hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa :

Pengaruh Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah.

B. Saran

Berdasarkan hasil korelasi berganda diperoleh pengaruh yang sangat kuat antara anggaran dana desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, maka perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sofianto, 2017, *Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*.
- Beratha, I Nyoman, 2012, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chambert, Chabib Sholeh dan Heru Rochamnsjah 2009, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Conyers, 2009, *Masyarakat Desa*, Liberty, Yogyakarta.
- Deky Aji Suseno, 2016, *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Jurnal Stie Semarang, Vol 8, NO 2.
- Gie, The Liang, 2014. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid 1, 2, 3. Liberty. Yogyakarta
- Hagel, Peter. 2016. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yayasan Bina Desa CV. Rajawali. Jakarta
- Hobley, 2009. *Manajemen Pembangunan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardiana Luvitasari, 2017, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADES), Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR), Dan Jumlah Murid Paud Terhadap*

- Alokasi Belanja Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri*
Permedagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Rasyid, M, 2009, *Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*, Universitas Tadulako, Palu.
- RIDWAN. (2018). PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA BATURIJAL BARAT KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Dan Bisnis (JIM2B)*, 1(1), 1–11.
- Saparin, Sumber, 2009, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sawe, Jamaluddin. 2009. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press. Bandung.
- Siagian, SP. 2011. *Administrasi Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2009. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soewito, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit FEUI,
- Suryaningrat, 2009. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press. Jakarta
- Sutaryono, Dyah Widuru, Akhmad Murtajib, 2014, *Buku Pintar: Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta.
- Sutopo dan Dwi Tiyanto, 2014, *Pentingnya Rpjm Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa*, Journal of Rural and Development, Volume V No. 2.
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;